

Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024

Munadi

Fakultas Komunikasi Sosial dan Politik, Universitas Sains Al-Qur'an
amunadi11@yahoo.com

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.6056

Submitted: 2023-12-06, Revised: 2023-12-20, Accepted: 2023-12-20

Abstrak

Pemilihan umum 2024 di Indonesia diperkirakan akan ditandai oleh partisipasi dominan generasi milenial dan Gen Z. Generasi ini menunjukkan perilaku politik yang berbeda karena kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Hal ini dipengaruhi oleh budaya digital yang berkembang pesat. Pergeseran ini menekankan relevansi etika politik sebagai fondasi kunci bagi kedewasaan politik, terutama di kalangan milenial. Dalam konteks pemilu, pilihan yang berbeda menuntut fokus sentral pada etika politik, dengan penekanan pada saling menghormati. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan integritas demokratis pemilu 2024. Menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif, penelitian ini mengusulkan tindakan tertarget: peningkatan pendidikan politik milenial, penekanan media pada pelaporan politik yang faktual untuk mengurangi risiko disinformasi, dan partisipasi aktif milenial untuk meningkatkan representasi demokratis. Rekomendasi penelitian ini didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang proses pemilihan umum, menekankan pentingnya perilaku politik etis bagi partisipasi berkomitmen dan bertanggung jawab generasi milenial dalam membentuk masa depan demokratis Indonesia.

Kata kunci: *generasi milenial, etika politik, pemilu 2024, pendidikan politik, faktualitas media*

Pendahuluan

Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi publik sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemilihan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab (Wardhani, 2018). Penting untuk diakui bahwa dalam negara demokrasi, pemilihan umum memiliki arti penting sebagai sarana untuk menyalurkan hak-hak politik dan memastikan partisipasi publik dalam kehidupan politik (Febriyanto & Firman, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, misalnya, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik suatu wilayah (Arniti, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik dalam pemilihan presiden termasuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik, memungkinkan mereka menentukan pembuat kebijakan mereka (Anderson & Kuswanto, 2021). Selain itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan lokal dipengaruhi oleh kesadaran dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah, serta pengetahuan mereka tentang politik (Hemafitria dkk., 2021).

Dalam konteks pemilihan umum, perilaku etis para aktor politik dan kepatuhan pada etika politik sangat penting. Etika politik dipandang sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip moral, mencerminkan komitmen seorang politisi pada perilaku etis, yang penting untuk pemeliharaan kepercayaan publik dan integritas proses pemilihan umum (Febriyanto & Dewi,

2021). Lebih jauh lagi, komunikasi politik memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, karena berfungsi sebagai sarana untuk melibatkan dan memobilisasi pemilih, sehingga berkontribusi pada promosi praktik pemungutan suara yang etis dan informatif (Sa'ban dkk., 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan lokal dianggap sebagai aspek penting dari masyarakat yang demokratis, mencerminkan karakteristik modernisasi politik dan menekankan pentingnya keterlibatan politik dalam kerangka demokrasi (Hemafitria dkk., 2021). Lebih lanjut, proses demokrasi, partai politik, dan pemilihan pemimpin daerah saling terkait, menyoroti pentingnya perilaku etis dan integritas politik dalam proses pemilihan umum (Sulaeman, 2017).

Etika politik memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan umum dan promosi perilaku etis di antara aktor politik. Komunikasi politik, partisipasi masyarakat, dan proses demokrasi semuanya dipengaruhi oleh perilaku etis para aktor politik, menggarisbawahi pentingnya menegakkan etika politik dalam konteks pemilihan umum. Perilaku etis dan integritas politik penting untuk memupuk kepercayaan publik, mempromosikan praktik pemungutan suara yang informatif, dan memajukan cita-cita demokratis dari proses pemilihan umum.

Bagaimana dengan etika politik pemilih (masyarakat), terutama generasi milenial? Perilaku etis pemilih milenial dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlibatan mereka dengan media sosial, komunikasi politik, dan literasi dalam masalah politik. Studi telah menunjukkan bahwa budaya politik pemilih milenial, khususnya dalam konteks pemilihan lokal, dibentuk oleh penggunaan teknologi instan dan canggih mereka, seperti platform media sosial, untuk terlibat dalam wacana politik dan mengekspresikan pendapat mereka (Fauzi, 2023).

Era pasca-reformasi telah menyaksikan perubahan signifikan dalam cara generasi milenial memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengekspresikan pendapat politik mereka, mencerminkan rasa kebebasan dan ekspresi yang meningkat di antara kelompok demografi ini (Susanto & Irwansyah, 2021). Selain itu, preferensi terhadap media sosial di kalangan pemilih milenial telah diamati secara signifikan memengaruhi pengetahuan mereka tentang calon legislatif, menunjukkan pengaruh platform digital terhadap kesadaran politik dan pengambilan keputusan mereka (Febriani, 2020). Penggunaan media sosial berbasis internet sebagai alat komunikasi politik telah menjadi fenomena yang menonjol dalam membentuk perilaku politik pemilih milenial, khususnya dalam konteks pemilihan lokal (Komariah & Kartini, 2019). Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi politik di kalangan kaum muda melalui komunikasi media telah menjadi instrumen penting dalam mempromosikan partisipasi politik yang berpengetahuan dan etis di kalangan demografi milenial (Nugraha et al., 2021). Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana etika politik generasi milenial dalam pemilu 2024? Terutama ketika Indonesia mengadakan pemilu ditahun tersebut. Apa upaya yang perlu diantisipasi untuk menghadapi pemilih yang cenderung terbuka terhadap arus informasi tersebut?

Metode

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan data pustaka digunakan untuk menganalisis etika politik generasi milenial dalam pemilu 2024. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan holistik tentang fenomena sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Tahap awal, peneliti melakukan studi literatur untuk mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya yang membahas tentang etika politik, generasi milenial, dan pemilu. Berdasarkan hasil studi literatur, peneliti merumuskan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti. Misalnya, definisi operasional dari variabel "etika politik" adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku para pelaku politik dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Peneliti kemudian mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya. Data pustaka tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik pencarian literatur yang relevan, seperti pencarian menggunakan kata kunci, pencarian berdasarkan topik, atau pencarian berdasarkan penulis. Data pustaka yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, analisis naratif, atau analisis diskursif. Hasil analisis data pustaka kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pola Perilaku Politik di Dunia Maya

Transformasi politik di Indonesia tidak terlepas dari peran media massa. Media massa memiliki peran penting dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politiknya. Dalam merespons perubahan politik pasca Orde Baru, media massa menyajikan informasi yang beragam dan cenderung independen. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi isu-isu politik.

Perubahan perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor kulturalisasi. Generasi milenial, yang tumbuh dan berkembang di era digital, memiliki pandangan politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial lebih kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Media massa juga memainkan peran penting dalam komunikasi politik. Kampanye politik tidak bisa terlepas dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada bulan Oktober-November 2023 menunjukkan bahwa generasi milenial lebih tertarik dengan branding yang ekspresif dan menggemaskan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang menunjukkan bahwa suara untuk salah satu peserta pemilu meningkat dari 36,9% menjadi 41,6% setelah peserta tersebut menggunakan branding yang menggemaskan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menyatakan bahwa 55-60% pemilih dalam Pemilu 2024 didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Oleh karena itu,

generasi muda perlu memahami visi misi para calon peserta pemilu sebelum menentukan pilihannya.

Pola perilaku politik pada media massa terbukti berubah dengan generasi milenial sebagai pelaku utama. Berbeda dengan pemilu 2019 lalu yang diwarnai dengan konten berita hoaks dan politik identitas, pemilu 2024 diprediksi akan lebih terbuka dan reaktif terhadap perubahan. Hal ini disebabkan oleh generasi milenial yang tumbuh di tengah perubahan politik besar-besaran di Indonesia.

Generasi milenial cenderung lebih terbuka dalam memandang politik maupun ekonomi, serta reaktif terhadap segala perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Oleh karena itu, memahami latar belakang dan aspirasi generasi milenial menjadi kunci kemenangan dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, generasi milenial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil Pemilu 2024. Preferensi pemilu yang bergeser dari pemilu sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan pola perilaku politik generasi milenial.

Relevansi dengan Etika

Dalam konteks teori etika, penting untuk mempertimbangkan teori etika normatif seperti utilitarianisme, deontologi, dan teori berbasis hak. Teori-teori ini menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan norma atau aturan yang telah ditetapkan (Riduwan & Andayani, 2018). Selain itu, manifestasi teori psikoanalisis dalam etika bisnis dan dampaknya terhadap kegagalan etika telah diteliti, menunjukkan relevansi teori psikologis dalam memahami perilaku etis (Amalia & Hamidah, 2023).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemimpin yang baik adalah panutan yang mampu diteladani oleh masyarakat. Dalam Pemilu 2024, kita harus memilih pemimpin yang memiliki kualitas yang dapat ditiru. Selain itu, Jimly juga berpendapat bahwa ilmu tata negara harus direkonstruksi menjadi ilmu tata bangsa yang tidak hanya mencakup hukum tata negara, tetapi juga etika.

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan pemimpin dalam negara republik Indonesia yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada masa menjelang pemilu, publik selalu hangat membahas mengenai calon-calon pemimpin yang akan memimpin negara. Pemilu 2024 yang didominasi oleh pemilih dari generasi milenial menjadi sesuatu yang menarik karena perubahan pola-pola dalam berpolitik.

Perubahan pola ini didukung oleh teknologi yang mampu mempresentasikan situasi politik terkini dengan cepat dan responsif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bebas dan terbuka dalam menyampaikan argumennya untuk menanggapi isu-isu politik. Namun, Pemilu 2019 menjadi tolak ukur pembelajaran karena banyaknya argumen yang memecah belah masyarakat dengan ujaran kebencian dan konten hoaks.

Oleh karena itu, segala sikap yang dituangkan dalam berpolitik perlu ditinjau dari segi etika. Etika dalam berpolitik menjadi hal yang sangat penting untuk menunjukkan

kedewasaan kita dalam berpolitik, terutama pada generasi milenial. Dalam pemilu, tentunya terjadi perbedaan dalam menentukan pilihan pemimpin yang diharapkan. Perbedaan ini menjadikan etika politik menjadi hal yang sentral karena penting untuk bisa saling menghormati satu sama lain.

Menurut data yang dihimpun oleh Narasi News Room melalui konten Instagramnya, sebanyak lebih dari enam ribu akun menyukai salah satu konten yang berisi gagasan salah seorang calon presiden yang disampaikan dalam acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit 2023 pada tanggal 24 November 2023. Gagasan tersebut membahas tentang sulitnya lowongan pekerjaan yang akan dihadapi oleh generasi mendatang. Konten tersebut menggunakan hipotesis bahwa jika lowongan pekerjaan semakin sulit, maka angka pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Namun, para responden konten tersebut justru menguji kembali gagasan tersebut dengan praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi milenial sudah bersikap sesuai dengan seharusnya, yaitu mengkorelasikan antara teori dan praktik. Dewasa ini, relevansi teori etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah mulai berubah, tetapi belum secara masif. Masih banyak narasi-narasi kebencian yang muncul dari berbagai responden di media massa. Narasi-narasi tersebut digunakan untuk menyerang kandidat lain dalam rangka mendulang suara.

Seyogyanya, gagasan yang disampaikan oleh peserta pemilu haruslah mengandung nilai-nilai akademis dan humaniora. Dalam hal ini, masyarakat, terutama generasi milenial, harus lebih aktif lagi dalam menggaungkan gagasan yang positif. Hal ini bertujuan agar perbedaan pendapat dalam perdebatan tidak mengandung ujaran kebencian.

Upaya Preventif

Pemilu merupakan momen penting dalam sebuah negara demokrasi. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk memastikan dukungan pada pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan demokratis.

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah perpecahan antara pihak pro dan kontra dalam pemilu adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan politik. Pendidikan politik penting untuk meningkatkan pemahaman generasi milenial tentang proses pemilu, berargumen secara kritis, dan mendorong partisipasi yang sadar. Dengan pendidikan politik, generasi milenial dapat memahami pentingnya pemilu dan memilih pemimpin yang tepat.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal. Pendidikan formal dapat diberikan melalui kurikulum sekolah, sedangkan pendidikan informal dapat diberikan melalui berbagai lembaga pendidikan nonformal, seperti LSM, organisasi kepemudaan, dan perguruan tinggi. Pendidikan politik yang berkualitas harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan

suara. Selain itu, pendidikan politik juga harus mampu mendorong generasi milenial untuk berargumen secara kritis dalam menyikapi isu-isu politik.

Kedua adalah faktualitas media. Media massa yang menekankan faktualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan obyektif. Hal ini dapat mengurangi risiko penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi opini pemilih. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, media massa perlu menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, seperti akurasi, obyektivitas, dan imparialitas. Media massa juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyaring informasi yang diterima dari media. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi yang beredar, dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

Ketiga yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat memberikan representasi yang lebih baik dalam proses demokrasi. Dengan partisipasi aktif, generasi milenial dapat menyuarakan aspirasinya dan ikut menentukan masa depan bangsa. Partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat didorong melalui berbagai cara, seperti memberikan pendidikan politik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi politik.

Pemerintah, masyarakat, dan media massa perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa upaya preventif tersebut dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil dan demokratis, serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Penutup

Pemilu 2024 di Indonesia diprediksi akan didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Generasi ini memiliki pola perilaku politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu lebih kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kulturalisasi, di mana generasi milenial tumbuh dan berkembang di era digital.

Perubahan pola perilaku politik generasi milenial ini memiliki relevansi dengan teori etika. Etika politik menjadi hal yang penting untuk menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, terutama pada generasi milenial. Dalam pemilu, tentunya terjadi perbedaan dalam menentukan pilihan pemimpin yang diharapkan. Perbedaan ini menjadikan etika politik menjadi hal yang sentral karena penting untuk bisa saling menghormati satu sama lain.

Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk memastikan dukungan pada Pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan demokratis, sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan ini. Diantaranya, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik untuk generasi milenial. Pendidikan politik yang berkualitas dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemilu, sehingga generasi milenial dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Kemudian, media massa perlu meningkatkan faktualitas pemberitaan politik. Media massa yang mengedepankan faktualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan obyektif, sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Yang paling utama, pemerintah dan masyarakat perlu mendorong partisipasi aktif

generasi milenial dalam pemilu. Partisipasi aktif generasi milenial dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amalia, S. and Hamidah, H. (2023). Pengejawantahan teori psikoanalitik pada etika bisnis. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 32-47.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52825>
- An, J., Kwak, H., Posegga, O., & Jungherr, A. (2019). Political discussions in homogeneous and cross-cutting communication spaces. *Proceedings of the International Aaai Conference on Web and Social Media*, 13, 68-79.
<https://doi.org/10.1609/icwsm.v13i01.3210>
- Anderson, I. and Kuswanto, K. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik pada pemilihan umum presiden tahun 2019 di kota jambi (pendekatan regresi logit). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 142.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32242>
- Arniti, N. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Fauzi, H. (2023). Budaya politik pemilih milenial (studi kasus pilkada kabupaten solok selatan tahun 2020). *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 89-94. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.98>
- Febriani, N. (2020). Preferensi media sosial generasi milenial pada tingkat pengetahuan calon legislatif. *Nyimak Journal of Communication*, 4(1), 89.
<https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2225>
- Febriany, F. and Dewi, D. (2021). Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 690-695.
<https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.139>
- Febriyanto, S. and Firman, M. (2023). Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)*, 2(1).
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>
- Hemafitria, H., Novianty, F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kabupaten sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Hemafitria, H., Novianty, F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kabupaten sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Indrawan, J., Rosa, A., Ilmar, A., & Nathanael, G. (2021). Partisipasi politik masyarakat di era politik siber. *Journal of Political Issues*, 3(1), 1-12.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>

- Komariah, K. and Kartini, D. (2019). Media sosial dan budaya politik generasi milineal dalam pemilu. *Aristo*, 7(2), 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>
- Nugraha, A., Wibowo, K., & Sjoraida, D. (2021). Penyuluhan komunikasi media mengenai literasi politik bagi kalangan generasi muda di era konvergensi. *Charity*, 4(2a), 38. <https://doi.org/10.25124/charity.v4i2a.4230>
- Riduwan, A. and Andayani, A. (2018). Peran akuntansi dalam pertanggungjawaban sosio-ekologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9012>
- Sa'ban, L., Wijaya, A., & Doli, L. (2020). Meningkatkan partisipasi pemilih melalui komunikasi politik. *Jisip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 90-97. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2227>
- Sulaeman, A. (2017). Demokrasi, partai politik dan pemilihan kepala daerah. *Cosmogov*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>
- Supit, G. and Wuryanta, A. (2021). Media sosial sebagai media politik dalam pilkada (studi kasus pemanfaatan media sosial dalam pilkada kabupaten sukabumi 2020). *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 6(3), 314. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v6i3.17439>
- Susanto, R. and Irwansyah, I. (2021). Media sosial, demokrasi, dan penyampaian pendapat politik milenial di era pasca-reformasi. *Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65-77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- Wardhani, P. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>